



**LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH  
( LPPD)**

**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN**

**TAHUN 2016**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Dasar Hukum**

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pasaman dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, maka ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 55 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pasaman.

#### **B. Gambaran Umum Organisasi**

##### **1. Visi dan Misi**

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, kekuatan dan kelemahan, tantangan dan peluang yang ada serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Visi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021 adalah "MEWUJUDKAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH SEBAGAI PENUNJANG KEBERHASILAN PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MELALUI KEPEGAWAIAN YANG PROFESIONAL DAN BERKUALITAS"

Visi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pasaman mengacu pada Visi Pemerintah Kabupaten Pasaman dan Visi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi. Hal ini dapat dipahami mengingat Badan Kepegawaian Daerah merupakan bagian integral dari Pemerintah Daerah Kabupaten dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi. Dalam konteks tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah dapat dikerangka dengan diwujudkan pemerintah yang baik melalui peningkatan akuntabilitas publik dan kualitas Sumber Daya Manusia aparatur dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman.

Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, ditetapkanlah misi Badan Kepegawaian Daerah yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana. Lebih jauh dengan mempertimbangkan kebutuhan apa yang hendak dipenuhi, siapa yang memiliki kebutuhan dan bagaimana memenuhi kebutuhan tersebut, maka misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pasaman adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan manajemen kepegawaian dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan.
- b. Meningkatkan aparatur pemerintah terhadap peraturan yang berlaku serta kebijakan, instruksi yang ditetapkan.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan dan manajemen Sumber Daya Aparatur.

Misi tersebut disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan dan tuntutan dari masyarakat yang menginginkan pelayanan yang lebih baik dari aparat pemerintah. Untuk itu diperlukan aparat yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan tersebut dijadikan misi yang hendak dicapai dan dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah dengan mengimplementasikannya pada segenap jajaran aparat Pemerintah dan melalui pemberian pelayanan yang prima pada masyarakat.

## 2. Gambaran Umum Organisasi

a. Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural/Fungsional, Golongan/Pangkat dan Pendidikan.

No	Nama	L/P	Jabatan	Gol/ Pangkat	Pendidikan	Diklat PIM
A	STRUKTURAL					
I	SEKRETARIAT					
1	Drs. HASIROLAN HUTAGALUNG	L	Sekretaris	IV/b/Pembina Tk.I	S1 Fisipol	PIM II 2006
2	ANAS	L	Kasubag. Umum	III/d/Penata Tingkat I	SLTA 1981	SEPADA 1994
3	IRMA, ST	P	Kasubag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	III/c/Penata	S1 Teknik Sipil 2001	
4	RENI YULIA,SE	P	Kasubag. Keuangan	III/b/Penata Muda Tk. I	S1 Ekonomi 2008	
5	Drs. MARJOHAN,MM	L	Fungsional Umum	IV/b/Pembina Tk.I	S2 2005	SPAMA
6	EMDISON, S.Pd,MM	L	Fungsional Umum	IV/b/Pembina Tk.I	S2 Manajemen 2005	PIM III 2014
7	Drs. DEAS KHAIRNALIM	L	Fungsional Umum	IV/b/Pembina Tk.I	S1 Administrasi 1990	PIM III 2010
8	MHD. ALI	L	Fungsional Umum	IV/a/Pembina		

No	Nama	L/P	Jabatan	Gol/ Pangkat	Pendidikan	Diklat PIM
	HANAFIAH,S.Pd					
9	YOSIE HOLENSIA.D, SE	P	Fungsional Umum	III/b/Penata Muda Tk.I	S1 Manajemen 2005	-
10	VENI TRI OKVANITA,SE	P	Fungsional Umum	III/b/Penata Muda Tk.I	S1 Manajemen 2009	-
11	MARJUNISON	L	Sopir	II/c/Pengatur	SLTA 1992	-
12	ROZIA ANUM	P	Fungsional Umum	II/c/Pengatur	SLTA 2001	-
13	YASRIL.R	L	Fungsional Umum	II/b/Pengatur Muda Tk.I	SLTA 1985	-
14	RISMAN	L	Caraka/Pramu Kantor	II/b/Pengatur Muda Tk.I	SLTA 1988	-
15	IBRAHIM	L	Sopir	II/b/Pengatur Muda Tk.I	SLTA 2005	-
16	HASMIDAR	P	Petugas K3	I/c/Juru	Paket B	-
II	BIDANG MUTASI KEPEGAWAIAN					
17	NULFIKAR, S.Ag	L	Kabid. Mutasi Kepegawaian	IV/a/Pembina	S1 Agama 1996	PIM III 2010
18	EDWARD, SH	L	Kasubid. Pengkatan dan Pensiun	III/d/Penata Tingkat I	S1 Hukum 2002	PIM IV 2012
19	MARTA YANDRA,S.Kom	L	Kasubid. Mutasi Kepegawaian	III/d/Penata Tingkat I	S1 Komputer 2003	PIM IV 2016
20	SYACHOIRANI,S.Kom	P	Fungsional Umum	III/b/Penata Muda Tk. I	S1 Komputer	
21	DESSY SUSIYANTI, SE	P	Fungsional Umum	III/b/Penata Muda Tk. I	S1 Manajemen 2010	-
22	HENDRIZAL, SH	L	Fungsional Umum	III/a/Penata Muda	S1 Hukum 2013	-
23	TRIAS INERDA PUTRI,A.Md	P	Fungsional Umum	-	-	-
III	BIDANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN					
24	ASRIAL,SH	L	Kabid. Pembinaan dan Pengembangan	III/d/Penata Tingkat I	S1 Hukum 2014	ADUM 1999
25	JONNIZAR, SH	L	Kasubid. Pembinaan	III/d/Penata	S1 Hukum	ADUM

No	Nama	L/P	Jabatan	Gol/ Pangkat	Pendidikan	Diklat PIM
				Tingkat I	2002	1999
26	DIKRI YENNI, SH	P	Kasubid. Perencanaan dan Formasi	III/d/Penata Tingkat I	S1 Hukum 1991	ADUM 1998
27	RAFNINELI,S.IP,M.Si	P	Fungsional Umum	IV/a/Pembina	S2 Manajemen 2005	PIM III 2013
28	IRMAWATI,S.Kom	P	Fungsional Umum	III/c/Penata	S1 Komputer 2005	-
29	INDRA BASTIAN,SH	L	Fungsional Umum	III/a/Penata Muda	S1 Hukum 2011	-
30	PRIGUS ELFIDA, S. Psi	P	Fungsional Umum	III/a/Penata Muda	S1 Psikologi 2006	-
31	YURITA SUSANTI,S.Pd	P	Fungsional Umum	III/a/Penata Muda	S1 Pend.Biologi 2012	-
32	FINA ANDRIANI,S.STP	P	Fungsional Umum	III/a/Penata Muda	S1	
IV	BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
33	DRS.MUSTAYARDI	L	Kabid. Pendidikan dan Pelatihan	IV/b/Pembina Tk.I	S1 IAIN 1988	PIM III 2005
34	NIKMATUSSADISAH, SH, MH	P	Kasubid. Diklat Struktural	IV/a/Pembina	S2 Hukum 2012	PIM IV 2004
35	ALI AMRAN AL	L	Kasubid. Diklat Teknis Fungsional	III/d/Penata Tingkat I	SLTA 1984	-
36	YUTRIANE YUSHIR,SE,Akt,MM	P	Fungsional Umum	IV/a/Pembina	S2 Manajemen 2005	PIM III 2010
37	DEFI MULYANI, SH	P	Fungsional Umum	III/a/Penata Muda	S1 Ilmu Hukum 2014	-
V	BIDANG DOKUMENTASI DAN DATA					
38	JONI HAFIZAL,SH	L	Kabid. Dokumentasi dan Kesejahteraan	III/d/Penata Tingkat I	S1 Hukum 2002	ADUM 1999
39	ENDANG	P	Kasubid. Kesejahteraan	III/d/Penata Tingkat I	SMKK 1980	-
40	ABDUL MUHIR,SH	L	Kasubid. Dokumentasi dan Data	III/d/Penata Tingkat I	S1 Hukum 2005	PIM IV 2013
41	ELVA VERA, SH	P	Fungsional Umum	III/b/Penata	S1 Hukum	-

No	Nama	L/P	Jabatan	Gol/ Pangkat	Pendidikan	Diklat PIM
				Muda Tk. I	2011	
42	JUPRIAL, A.Md	L	Pranata Komputer	II/d/Pengatur Tk.I	D3 T.Komputer 2009	-
43	SURYADI	L	Fungsional Umum	II/b/Pengatur Muda Tk.I	SLTA 2002	-
B	FUNGSIONAL					
	-					

b. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang diatur sedemikian rupa sehingga dalam pelaksanaan tugas dan wewenang tidak terjadi tumpang tindih dan jelas tindakan apa yang akan diambil dan dilaksanakan. SOP pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah kabupaten Pasaman dikelompokkan per unit organisasi dengan jumlah sebagai berikut :

No	Nama	Jumlah	Keterangan
1).	SOP Uraian Tugas Sub Bagian Umum	14	
2).	SOP Uraian Tugas Sub Bagian Keuangan	11	
3).	SOP Uraian Tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	13	
4).	SOP Uraian Tugas Sub Bidang Mutasi Kepegawaian	3	
5).	SOP Uraian Tugas Sub Bidang Pengangkatan dan Pensiun	6	
6).	SOP Uraian Tugas Sub Bidang Pembinaan	22	
7).	SOP Uraian Tugas Sub Bidang Perencanaan dan Formasi	15	
8).	SOP Uraian Tugas Sub Bidang Diklat Struktural	5	
9).	SOP Uraian Tugas Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional	12	
10).	SOP Uraian Tugas Sub Bidang Dokumentasi dan Data	19	
11).	SOP Uraian Tugas Sub Bidang Kesejahteraan	4	

c. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sebagaimana diketahui bahwa Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang mutu pelayanan yang secara minimal harus disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Urusan Wajib dalam kurun waktu tertentu.

Sehubungan dengan hal tersebut, sampai saat ini Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pasaman belum memiliki Standar Pelayanan Minimal bagi kegiatan bidang kepegawaian. Meskipun kegiatan tersebut tidak termasuk dalam kategori pelayanan dasar, namun demikian perlu kiranya ada suatu standar yang formal dalam pelayanan terhadap aparatur pada khususnya dan masyarakat pada umumnya sehingga pada gilirannya akan berdampak terhadap optimalisasi kinerja organisasi.

d. Peraturan yang mendasari pelaksanaan Tugas dan Fungsi, Program dan Kegiatan Organisasi.

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri sipil;
2. Undang-undang Nomor 43 tentang 1999 Pokok-Pokok Kepegawaian.
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pengawasan Pemerintah atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
20. Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil.
21. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2001 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil.

22. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian.
23. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pengadilan Pegawai Negeri Sipil dibidang Kepegawaian sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasaman periode 2010-2025
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman.
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2010-2015;
27. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2009 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar.
28. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pembinaan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
29. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 55 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pasaman.
30. Surat Edaran Bupati Pasaman Nomor 800/101/PP/VII/BKD-2011 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar.
31. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 181/417/BUP-PAS-2015 dan Nomor 893.3/390/PUSDIKLAT-2015 Tanggal 14 April 2015 tentang Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Pasaman dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri Regional Bukittinggi dalam pelaksanaan Latihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungan Pemerintah kabupaten Pasaman pola Fasilitas.
32. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 181/943/BUP-PAS-2015 dan Nomor 893.3/974.a/PUSDIKLAT-2015 Tanggal 1 Oktober 2015 tentang Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Pasaman dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri Regional Bukittinggi dalam pelaksanaan Latihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungan Pemerintah kabupaten Pasaman pola Fasilitas.
33. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 181/1215/BKD-2015 dan Nomor 800/266/PKS/BKD-2015 Tanggal 12 November 2015 tentang Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Pasaman dengan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam pelaksanaan Latihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungan Pemerintah kabupaten Pasaman pola Kontribusi.

- e. Jumlah Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja (Renja SKPD), Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) adalah sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

NO	RENJA	NO	RKA	NO	DPA
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1	Administrasi Perkantoran	1	Administrasi Perkantoran	1	Administrasi Perkantoran



NO	RENJA	NO	RKA	NO	DPA
2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
3	Rapat dan Koordinasi	3	Rapat dan Koordinasi	3	Rapat dan Koordinasi
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4	Pengadaan Peralatan dan Mesin	4	Pengadaan Peralatan dan Mesin	4	Pengadaan Peralatan dan Mesin
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
5	Pengadaan Pakaian Aparatur	5	Pengadaan Pakaian Aparatur	5	Pengadaan Pakaian Aparatur
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
6	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Daerah	6	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Daerah	6	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Daerah
7	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi PNS Daerah	7	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi PNS Daerah	7	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi PNS Daerah
8	Pendidikan dan Pelatihan Outbound bagi Aparatur	-	-		
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
9	Penyusunan Laporan SKPD	8	Penyusunan Laporan SKPD	8	Penyusunan Laporan SKPD
VI	Program Pendidikan Kedinasan	VI	Program Pendidikan Kedinasan	VI	Program Pendidikan Kedinasan
10	Pendidikan Penjenjangan Struktural	9	Pendidikan Penjenjangan Struktural	9	Pendidikan Penjenjangan Struktural
VII	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	VII	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	VII	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
11	Seleksi Penerimaan CPNS	10	Seleksi Penerimaan CPNS	10	Seleksi Penerimaan CPNS
12	Penempatan PNS	11	Penempatan PNS	11	Penempatan PNS
13	Pembangunan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	12	Pembangunan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	12	Pembangunan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
14	Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS	13	Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS	13	Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS
15	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	14	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	14	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
16	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat PNS	15	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat PNS	15	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat PNS
17	Analisis Kebutuhan PNS Berdasarkan Beban Kerja	16	Analisis Kebutuhan PNS Berdasarkan Beban Kerja	16	Analisis Kebutuhan PNS Berdasarkan Beban Kerja

NO	RENJA	NO	RKA	NO	DPA
18	Seleksi PNS Berprestasi dan Pengambilan Sumpah PNS	17	Seleksi PNS Berprestasi dan Pengambilan Sumpah PNS	17	Seleksi PNS Berprestasi dan Pengambilan Sumpah PNS
19	Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Pegawai	18	Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Pegawai	18	Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Pegawai
20	Pelaksanaan Ujian Dinas dan Kenaikan Tingkat PNS	19	Pelaksanaan Ujian Dinas dan Kenaikan Tingkat PNS	19	Pelaksanaan Ujian Dinas dan Kenaikan Tingkat PNS
21	Pengelolaan Kartu Pegawai, Kartu Istri, Kartu Suami dan Kartu Taspen	21	Pengelolaan Kartu Pegawai, Kartu Istri, Kartu Suami dan Kartu Taspen	21	Pengelolaan Kartu Pegawai, Kartu Istri, Kartu Suami dan Kartu Taspen
22	Penelitian Kelengkapan Dokumen Pindah/Masuk	22	Penelitian kelengkapan dokumen PNS pindah masuk	22	Penelitian kelengkapan dokumen PNS pindah masuk
23	Penataan Dokumen CPNS	23	Penataan dokumen CPNS	23	Penataan dokumen CPNS

### BAB III

#### PROGRAM URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN

#### 3.2. Prioritas Urusan Wajib yang dilaksanakan

##### 3.2.1. Program dan Kegiatan

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Badan Kepegawaian Daerah selama tahun 2016 melaksanakan Program dan Kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 3.2.1.1**  
**Program dan Kegiatan**

No	Urusan / Program dan Kegiatan	Kegiatan/Bidang Pelaksana	
A	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Administrasi Perkantoran/ Sekretariat
		2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran/ Sekretariat
		3	Rapat dan Koordinasi/ Sekretariat
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin/ Sekretariat
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	Pengadaan Pakaian Aparatur/ Sekretariat
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Daerah/ Bidang Pendidikan dan Pelatihan
		2	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi PNS Daerah/ Bidang Pendidikan dan Pelatihan
5	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	Penyusunan Laporan SKPD/ Sekretariat
6	Program Pendidikan Kedinasan	1	Pendidikan Penjurusan Struktural/ Bidang Pendidikan dan Pelatihan

No	Urusan / Program dan Kegiatan	Kegiatan/Bidang Pelaksana
7	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1 Seleksi Penerimaan CPNS/ Bidang Pembinaan dan Pengembangan
		2 Penempatan PNS/ Bidang Mutasi Kepegawaian
		3 Pembangunan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah/ Bidang Dokumentasi dan Kesejahteraan
		4 Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS/ Bidang Pembinaan dan Pengembangan
		5 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas/ Bidang Pembinaan dan Pengembangan
		6 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat PNS/ Bidang Mutasi Kepegawaian
		7 Analisis Kebutuhan PNS Berdasarkan Beban Kerja/ Bidang Pembinaan dan Pengembangan
		8 Seleksi PNS Berprestasi dan Pengambilan Sumpah PNS/ Bidang Pembinaan dan Pengembangan
		9 Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Pegawai/ Bidang Pembinaan dan Pengembangan
		10 Pelaksanaan Ujian Dinas dan Kenaikan Tingkat PNS/ Bidang Pembinaan dan Pengembangan
		11 Pengelolaan Kartu Pegawai, Kartu Istri, Kartu Suami dan Kartu Taspen/ Bidang Dokumentasi dan Kesejahteraan
		12 Penelitian kelengkapan dokumen PNS pindah masuk/ Bidang Mutasi Kepegawaian
		13 Penataan dokumen CPNS/ Bidang Mutasi Kepegawaian

**3.2.2. Ringkasan Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan berdasarkan DPA-P SKPD sebagaimana tercantum pada Format Tabel II.3 terlampir.**

### **3.2.3. Realisasi Program dan Kegiatan**

Tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pasaman sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.2.1.2  
Realisasi Program dan Kegiatan**

No	Urusan / Program dan Kegiatan	Realisasi/Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan (What, Who, When, Where and Why)
A	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
1	Administrasi Perkantoran	Terlaksananya jasa pelayanan dan pengelolaan administrasi kantor selama satu tahun pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pasaman. Target kinerja 12 bulan dan realisasi 12 bulan dengan capaian kinerja 100%.
2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Terlaksananya pemeliharaan kebersihan kantor dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran selama satu tahun pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pasaman. Target kinerja 12 bulan dan realisasi 12 bulan dengan capaian kinerja 100%.
3	Rapat dan Koordinasi	Tersedianya fasilitasi perjalanan dinas dalam dan luar daerah dan luar propinsi dalam rangka rapat dan koordinasi selama satu tahun pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pasaman. Target kinerja 1 tahun dan realisasi 1 tahun dengan capaian kinerja 100%.
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang terdiri dari : Pengadaan wireless, Pengadaan laptop 3 buah, Pengadaan Scanner 1 buah, Pengadaan meja kerja 3 buah, Pengadaan meja rapat 20 buah, Pengadaan kursi pejabat eselon IV 8 buah, Pengadaan kursi rapat 50 buah, sofa 2 set dan lemari arsip 4 buah dengan capaian kinerja 95%.
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	
1	Pengadaan Pakaian Aparatur	Tersedianya pakaian aparatur yang terdiri dari pakaian dinas harian dan pakaian olah raga. kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin aparatur dalam berpakaian dinas. Target kinerja 55 stel, realisasi 40 stel dengan capaian kinerja 100%. Ada 15 stel yang tidak direalisasikan, karena adanya perpindahan pegawai dari Badan Kepegawaian Daerah ke SKPD lain.
VI	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
1	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Daerah	Terlaksananya pengurusan Sertifikat dan KIR Kesehatan sebanyak 11 CPNS Gol. II dan 61 CPNS Gol. III yang pelaksanaan Diklat Prajabatannya pada tahun 2015, dan terselesaikan administrasi Diklat Prajabatan untuk 11 CPNS, dengan realisaasi kegiatan 100%.
2	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi PNS Daerah	Terlaksananya Diklat Teknis Tugas dan Fungsi yang diikuti sebanyak 42 orang Aparatur yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman dengan pola Kontribusi dari target peserta 50 orang. Realisasi kegiatan 84 %. Diklat Teknis Fungsional diikuti oleh PNS yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan SKPD. Adapun jenis diklat yang diikuti tersebut adalah sebagai berikut:
		1. Diklat Teknis Revolusi Mental, diikuti oleh 1 orang utusan

		dari BKD, diselenggarakan di Bukittinggi dari tanggal 25 s/d 30 Januari 2016 dengan penyelenggara BPSDM Kemendagri RI.
		2. Diklat Teknis Penata Usahaan Keuangan Daerah bagi Bendahara, diikuti oleh 2 orang utusan dari Disdukcapil dan Disporabudpar, diselenggarakan di Bukittinggi dari tanggal 15 s/d 20 Februari 2016, dengan penyelenggara Pusdiklat Regional Bukittinggi.
		3. Bintek Strategi Pencegahan masalah hukum Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, diikuti oleh 4 orang utusan dari Pokja ULP-Kab. Pasaman di Jakarta dari tanggal 21 s/d 24 Februari 2016, dengan penyelenggara Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI)
		4. Diklat Teknis Pelaporan Keuangan berbasis Akruar bagi Perangkat Daerah diikuti oleh 2 orang utusan dari DPPKA dan Inspektorat, diselenggarakan di Kampus Pusdiklat Reg. Bukittinggi dari tanggal 28 Maret sd 2 April 2016 dengan penyelenggara Pusdiklat Kemendagri Reg. Bukittinggi.
		5. Pelatihan Jabatan Fungsional Admin Kesehatan, diikuti oleh 5 orang utusan dari Dinas Kesehatan, diselenggarakan di Padang, dari tanggal 4 s/d 14 April 2016, dengan penyelenggara UPTD BPOM PELKES, Dinkes Prop. Sumatera Barat.
		6. Diklat Penyusunan LAKIP, Renstra dan Renja SKPD, diikuti oleh 1 orang utusan dari Setda, diselenggarakan di Yogyakarta dari tanggal 26 s/d 29 April 2016, dengan penyelenggara Pusdiklat Pemerintahan dan Keuangan Daerah.
		7. Diklat MOT, diikuti oleh 2 orang utusan dari Badan Kepegawaian Daerah, diselenggarakan di Bukittinggi dari tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 04 Mei 2016, dengan penyelenggara Pusdiklat Kemendagri Regional Bukittinggi.
		8. Pelatihan Pelayanan Publik Bagi ASN, diikuti oleh 1 orang utusan dari BKD, diselenggarakan di PPLPN-LAN Jakarta dari tanggal dengan penyelenggara LAN RI.
		9. Bintek Pemahaman dan Pencegahan dini terhadap Ancaman Bahaya Terorisme, diikuti oleh 1 orang utusan dari Pol.PP, diselenggarakan di Padang dari tanggal 23 s/d 24 Juli 2016, dengan penyelenggara DPD PEPABRI SUMBAR.
		10. Bintrek Standarisasi Pelayanan Adm Kependudukan Berstandar Internasional (ISO;9001-2000), diikuti oleh 1 orang utusan dari Disdukcapil dari tanggal 1 s/d 3 Agustus 2016, dengan penyelenggara Kerjasama Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Internasional Sertifikasi Service Manajemen.
		11. Bintek Pengelolaan Humas dan Keprotokolan, diikuti oleh 5 orang utusan dari Sekretariat Daerah, diselenggarakan di Jogyakarta dari tanggal 7 s/d 9 September 2016, dengan penyelenggara Pusat Kajian Pembangunan Otonomi Daerah.
		12. Bintek Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa diikuti oleh 2 orang utusan dari Sekretariat Daerah, diselenggarakan di Jakarta dari tanggal 22 s/d 26 Agustus 2016, dengan

		penyelenggara Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia.
		13. Pelatihan Jabatan Fungsional Bidan Jenjang Ahli, diikuti oleh 4 orang utusan dari Puskesmas Lubuk Sikaping dan Kumpulan, diselenggarakan di Pekan Baru dari tanggal 27 Juli sampai dengan 1 Agustus 2016, dengan penyelenggara Pengurus Daerah IBI Prov. Riau dan Pusdiklat Aparatus PPSDM Riau.
		14. Diklat Teknis Kependudukan dan Pencatatan Sipil diikuti oleh 2 orang utusan dari Disdukcapil, diselenggarakan di Bukittinggi dari tanggal 5 s/d 10 September 2016, dengan penyelenggara Pusdiklat Kemendagri Regional Bukittinggi.
		15. Diklat Fungsional Pengangkatan Arsiparis Tingkat Ahli diikuti oleh 1 orang utusan dari Bappeda, diselenggarakan di Bogor pada tanggal 1 Februari s/d 16 Maret 2016, dengan penyelenggara ANRI
		16. Bimtek Pengelolaan Humas dan Keprotokolan yang profesional diikuti oleh 5 orang utusan dari Sekretariat Daerah, diselenggarakan di Jogjakarta dari tanggal 18 s/d 21 Oktober 2016, dengan penyelenggara PKOD
		17. Kuliah singkat dan Studi Banding ke California University AS, diikuti oleh 1 orang utusan dari Sekretariat Daerah, tempat California, AS dari tanggal 13 s/d 23 November 2016 dengan penyelenggara Kerjasama APKASI dan California University.
		18. Seminar Pelayanan Publik dan pencegahan pungli diikuti oleh 1 orang utusan dari KP2TPM, diselenggarakan di Padang dari tanggal 16 s/d 17 Desember 2016, dengan penyelenggara LP3M UNP Padang.
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
1	Penyusunan Laporan SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD selama satu tahun, yang terdiri dari; Laporan Jurnal Harian PNS, Laporan Kegiatan, Laporan PAD, Laporan Pelaksanaan HAM, Laporan Kinerja, LKPJ, LPPD, Rencana Kinerja, Rencana Kerja SKPD, Perjanjian Kinerja, Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat dan Laporan lainnya, dengan capaian kinerja 100%.
V	Program Pendidikan Kedinasan	
1	Pendidikan Penjurusan Struktural	Diklat Penjurusan Struktural dilaksanakan dengan pola kontribusi yang bekerjasama dengan LAN, Badan Diklat Prov. Sumatera Barat dan Pudidlat Kemendagri Regional Bukittinggi. Diklat Kepemimpinan ini diikuti oleh 19 orang dari target 26 orang dengan rincian ; Diklat PIM Tk.III sebanyak 2 orang dan Diklat PIM Tk.IV sebanyak 17 orang dengan realisasi kegiatan 73,08%. Sedangkan Diklat PIM Tk. II sebanyak 2 orang calon peserta yang disetujui Pimpinan tidak dapat mengikuti Diklat karena yang bersangkutan mengundurkan diri. Adapun rincian nama-nama yang mengikuti diklat adalah sebagai berikut: a. Diklat PIM III yaitu: 1. Asrial Arfandi Hasan, S.STP NIP. 19840824 200212 1

		<p>001 Camat pada Kantor Camat Padang Gelugur</p> <p>2. Mardianto, SH NIP. 19700505 199603 1 005 Camat pada Kantor Camat Bonjol</p> <p>b. Diklat PIM IV, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Martha Yandra,S.Kom NIP. 19790402 200501 1 004 Kasubid Mutasi pada Badan Kepegawaian Daerah</li> <li>2. Syafrita, S.Pt NIP. 19710307 200604 2 002 Kasubag Perencanaan pada Dinas Pertanian</li> <li>3. dr. Herman Harun NIP.19810410 200901 1 005 Kepala pada Puskesmas Pegang Baru</li> <li>4. Jonneri Masli,SKM,MPH NIP.19750104 199803 1 004 Kasi Jaminan Kesehatan pada Dinas Kesehatan</li> <li>5. Fitriani, S.Pt NIP. 19790205 200501 2 008 Kasi Sarana Prasarana Peternakan pada Dinas Pertanian</li> <li>6. dr. Edwin Riva'i NIP. 19690715 200212 1 001 Kepala pada Puskesmas Rao</li> <li>7. Drs. Aprison NIP. 19680405 199503 1 004 Kasubag Tata Usaha pada Puskesmas Cubadak</li> <li>8. Nurhalimah, SKM NIP.19760819 19703 2 003 Kasi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit pada Dinas Kesehatan</li> <li>9. Sakdanil, SH NIP. 19661215 199203 1 006 Kasubag TU UPT Perlindungan Tanaman pada Dinas Pertanian</li> <li>10. Yenni Harti, SH NIP.19700204 199403 2 003 Kasubid Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat</li> <li>11. Abdul Rizal, SH NIP.19640415 198602 1 005 Kasi Penempatan Kerja pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja</li> <li>12. Hafrizalzul, SH NIP.19780426 200003 1 001 Kasi Kesbang dan Perlindungan Masyarakat pada Kesbangpol</li> <li>13. Neneng Yuningsih NIP.19690321 199003 2 002 Kasubag Evaluasi pada Kantor Camat Lubuk Sikaping</li> <li>14. Emmi Amnur, SE NIP.19731017 200701 2 005 Kasubid Perencanaan Pendidikan dan Kebudayaan pada Bappeda</li> <li>15. Risdell Kamar, SH NIP.19650608 199003 1 005 Kasubag TU UPT Laboratorium pada Badan Lingkungan Hidup</li> <li>16. dr. Monalisa NIP.19810222 200604 2 022 Kepala pada Puskesmas Silayang</li> <li>17. Asmida, SH NIP. 19731210 199312 2 001 Kasubag Kelembagaan dan Anjab pada Sekretariat Daerah</li> </ol>
VII	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	
1	Seleksi Penerimaan CPNS	<p><b>Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/2631/M.PAN-RB/07/2016 tanggal 25 Juli 2016 tentang Informasi Mengenai Pengadaan Pegawai ASN Tahun 2016,</b> Pemerintah membatasi penerimaan pegawai baru dari pelamar umum, kecuali untuk pengangkatan Dokter, Dokter Gigi dan Bidan PTT Kementerian Kesehatan, Guru Garis Depan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, THL-TB Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian, lulusan sekolah kedinasan</p>



		<p>dan beberapa Kabupaten/ Kota di Papua, Papua Barat dan Kalimantan Utara. Untuk Kabupaten/ Kota lainnya Pemerintah meminta Kabupaten/ Kota agar melakukan redistribusi pegawai, baik internal maupun antar instansi.</p> <p>Sesuai dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara dan RB tersebut, untuk tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Pasaman tidak melaksanakan penerimaan CPNS sehingga kegiatan Seleksi Penerimaan CPNS tidak dapat dilaksanakan, dengan realisasi kegiatan hanya 8,97 %.</p>
2	Penempatan PNS	<p>Dalam rangka peningkatan produktivas kerja, pendayagunaan PNS dan pengembangan karir PNS, perlu dilakukan mutasi, rotasi dan pengisian jabatan yang kosong. Sebelum mutasi, rotasi dan pengisian jabatan yang kosong dilakukan, terlebih dahulu dilakukan rapat BAPERZAKAT dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati sebagai Pembina Kepegawaian Daerah.</p> <p>Selama tahun 2016, telah dilakukan penempatan PNS dalam rangka mutasi, rotasi dan pengisian jabatan yang kosong sebanyak 10 kali, dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penempatan Jabatan Eselon II.a sebanyak 1 (satu) orang.</li> <li>2. Penempatan Jabatan Eselon III sebanyak 51 (lima puluh satu) orang.</li> <li>3. Penempatan Jabatan Eselon IV sebanyak 91 (sembilan puluh satu) orang.</li> <li>4. Penempatan Jabatan Kepala SLTA/SLTP sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang.</li> <li>5. Penempatan Jabatan Kepala Sekolah SLTP sebanyak 3 (tiga) orang.</li> <li>6. Penempatan Jabatan Kepala Sekolah Dasar sebanyak 197 (seratus sembilan puluh tujuh) orang.</li> </ol>
3	Pembangunan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	<p>Kegiatan Pembangunan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah melaksanakan peremajaan data bagi 5.461 PNS yang tersebar di SKPD, Kecamatan dan Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman. Untuk pelaksanaan kegiatan ini Badan Kepegawaian Daerah menggunakan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) yang dibangun dan dikembangkan oleh Badan Kepegawain Negara. Pada tahun berjalan juga dilaksanakan verifikasi berkas dan penyampaian sebanyak 5.262 berkas. Penataan ulang PNS ke Kantor Regional XII BKN Pekanbaru sebagai tindak lanjut pelaksanaan e-PUPNS 2015.</p> <p>Kemudian berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Sub Bidang Dokumentasi dan Data Kepegawaian juga melaksanakan pengalihan status kepegawaian PNSD Kabupaten Pasaman menjadi PNSD Provinsi/PNS Pusat (Kementrian). Selain kegiatan tersebut, juga melaksanakan penghimpunan data PNS dalam pembuatan Buku Nominatif PNS periode Juni 2016 dan periode Desember 2016. Realisasi 100%.</p>
4	Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS	<p>Kegiatan Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin di Kabupaten Pasaman untuk tahun 2016, lebih banyak terkait dengan permasalahan rumah tangga PNS. Selama tahun 2016 permohonan izin pengurusan perceraian yang masuk sebanyak 22 orang, dan yang telah diberikan izin mengurus perceraian</p>

		oleh Bupati Pasaman sebanyak 13 orang dan 9 orang sedang menjalani proses. Disamping itu telah dilakukan penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat terhadap 3 orang PNS, dengan diberhentikan sebagai PNS. Capaian kinerja tahun ini adalah 100%.
5	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 16 tahun 2009 tentang tugas belajar dan izin belajar bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman. Pada tahun 2016 ini telah diberikan bantuan dana pendidikan bagi PNS yang mempunyai surat Keputusan tugas belajar sebanyak 9 orang dengan jumlah dana Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Sedangkan untuk seleksi Penerimaan Praja IPDN tahun 2016 dilaksanakan langsung oleh Kementerian Dalam Negeri secara online. Realisasi kegiatan sebesar 100%.
6	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat PNS	Kenaikan pangkat dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan pemberitahuan kepada SKPD untuk menyampaikan usulan kenaikan pangkat PNS. Usulan yang disampaikan oleh SKPD akan diteliti, bagi berkas yang memenuhi syarat akan diproses dan diusulkan ke Badan Kepegawaian Negara, dan bagi berkas yang belum memenuhi syarat akan dikembalikan kepada yang bersangkutan melalui SKPD. Selama tahun 2016, BKD Kabupaten Pasaman telah melakukan pengusulan kenaikan pangkat PNS yang telah disetujui oleh BKN sebanyak 898 usulan, dengan rincian sebagai berikut: 1. Periode April 2016 a. Golongan I = 6 orang b. Golongan II = 52 orang c. Golongan III = 420 orang d. Golongan IV = 28 orang 2. Periode Oktober 2016 a. Golongan I = 5 orang b. Golongan II = 31 orang c. Golongan III = 304 orang d. Golongan IV = 52 orang
7	Analisis Kebutuhan PNS Berdasarkan Beban Kerja	Dalam proses analisa kebutuhan PNS berdasarkan beban kerja pada tahun 2016 dilaksanakan secara online dengan menggunakan sistem aplikasi e-formasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, sehingga capaian kinerja kegiatan ini hanya 30,50%.
8	Seleksi PNS Berprestasi dan Pengambilan Sumpah PNS	Pengambilan Sumpah/Janji PNS dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 3 ayat 1. Pengambilan Sumpah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman bagi PNS yang belum disumpah, telah selesai dilaksanakan terhadap 240 orang. Selain itu, Penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya terhadap Pegawai Negeri Sipil yang berkinerja/berprestasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman yang telah mengabdikan selama 10 Tahun, 20 Tahun dan 30 Tahun, untuk Tahun 2016 telah diusulkan PNS yang berprestasi untuk menerima penganugerahan tanda

		<p>kehormatan Satya Lancana Karya Satya sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- untuk 10 Tahun sebanyak 98 orang;</li> <li>- untuk 20 Tahun sebanyak 97 orang;</li> <li>- untuk 30 Tahun sebanyak 137 orang.</li> </ul> <p>Realisasi kegiatan 100%.</p>
9	Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Pegawai	<p>Monitoring dan evaluasi pembinaan PNS dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pengawasan dan pengendalian, peninjauan langsung ke lapangan/unit kerja masing-masing SKPD se-Kabupaten Pasaman. Kegiatan ini merupakan upaya untuk meningkatkan disiplin PNS, dan sebagai upaya dalam rangka penegakan dan pembinaan disiplin PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman. Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan PNS Kabupaten Pasaman yang memiliki disiplin tinggi, profesional, bertanggung jawab dan berkompoten. Telah dilaksanakan monitoring pada unit kerja di berbagai kecamatan wilayah Kabupaten Pasaman pada tahun 2016. Capaian kinerja 100%.</p>
10	Pelaksanaan Ujian Dinas dan Kenaikan Tingkat PNS	<p>Telah dilaksanakan ujian dinas dan kenaikan tingkat PNS pada tanggal 16 Juni 2016 di Gedung KOGSDA Lubuk Sikaping yang diikuti oleh 68 orang peserta dengan rincian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ujian Dinas Tingkat I sebanyak : 8 orang</li> <li>- Ujian Dinas Tingkat II sebanyak : 30 orang</li> <li>- Ujian Penyesuaian Ijazah S.1 sebanyak : 28 orang</li> <li>- Ujian Penyesuaian Ijazah SLTA/Paket C sebanyak : 2 orang</li> </ul>
11	Pengelolaan Kartu Pegawai, Kartu Istri, Kartu Suami dan Kartu Taspen	<p>Pengelolaan Kartu Pegawai, Kartu Istri, Kartu Suami dan Kartu Taspen dilaksanakan selama tahun berjalan (12 bulan) dengan beberapa tahap proses mulai dari penghimpun data, verifikasi berkas, pengajuan usulan penerbitan sampai kepada pendistribusian dokumen yang telah diterbitkan oleh Kantor Regional XII BKN Pekanbaru.</p> <p>Untuk tahun 2016 telah dilaksanakan proses pengurusan Kartu Pegawai, Kartu Istri, Kartu Suami dan Kartu Taspen sebanyak 1.479 Kartu dari target 500 kartu, dengan realisasi kegiatan 295,8 %.</p>
12	Penelitian kelengkapan dokumen PNS pindah masuk	<p>Penelitian kelengkapan dokumen dilakukan berdasarkan permohonan PNS yang akan pindah/masuk dari dan ke Kabupaten Pasaman, bagi berkas-berkas yang sudah memenuhi syarat akan diproses lebih lanjut, dan bagi yang belum akan dikembalikan kepada yang bersangkutan untuk melengkapinya.</p> <p>Selama tahun 2016, telah dilakukan penelitian terhadap berkas-berkas yang mengajukan permohonan pindah/masuk PNS antar instansi sebanyak 201 orang, dan PNS pindah dari Kabupaten Pasaman/ Tugas Belajar sebanyak 41 orang.</p>
13	Penataan dokumen CPNS	<p>Sesuai dengan aturan BKD, pada awal tahun tetap mengajukan kebutuhan tambahan CPNS untuk formasi 2016. Sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat, bahwa sampai dengan tahun 2016 masih memberlakukan Moratorium penerimaan CPNS, sehingga Pemerintah Kabupaten Pasaman tidak dapat</p>

	melaksanakan penerimaan CPNS untuk formasi 2016. Karena penerimaan CPNS tidak dilaksanakan, kegiatan penataan dokumen CPNS juga tidak dapat direalisasikan.
--	---

### 3.2.4. Alokasi dan realisasi Anggaran (Berdasarkan DPA SKPD)

Alokasi dan realisasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pasaman pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 3.644.330.300,00 realisasi Rp. 1.642.312.214,00,- atau 45,06%.

Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program dan kegiatan dalam penyelenggaraan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Badan Kepegawaian Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.2.1.3**

#### **Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan**

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
A	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	542.503.000	348.645.390	64,27
1	Administrasi Perkantoran	230.170.000	181.473.689	78,84
2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	153.783.000	68.164.200	44,32
3	Rapat dan Koordinasi	158.550.000	99.007.501	62,45
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	356.597.000	65.550.000	18,38
4	Pengadaan Peralatan dan Mesin	356.597.000	65.550.000	18,38
III	Program Peningkatan disiplin aparatur	22.000.000	8.200.000	37,27
5	Pengadaan Pakaian Aparatur	22.000.000	8.200.000	37,27
IV	Program Peningkatan Kapasitas	254.323.500	104.548.850	41,11

	Sumber Daya Aparatur			
6	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNS	7.067.000	4.248.850	60,12
7	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi PNS Daerah	247.256.500	100.300.000	40,57
V	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000	6.522.600	65,23
8	Penyusunan Laporan SKPD	10.000.000	6.522.600	65,23
VI	Program Pendidikan Kedinasan	708.012.500	399.317.950	56,40
9	Pendidikan Penjurangan Struktural	708.012.500	399.317.950	56,40
VII	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1.750.894.300	709.527.424	40,52
10	Seleksi Penerimaan CPNS	513.862.500	42.523.850	8,28
11	Penempatan PNS	405.923.700	230.709.924	56,84
12	Pembangunan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	81.455.100	66.304.800	81,40
13	Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS	80.000.000	35.972.600	44,97
14	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	162.997.500	41.521.000	25,47
15	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat PNS	217.615.000	171.966.050	79,02
16	Analisis Kebutuhan PNS berdasarkan Beban Kerja	39.984.000	8.171.000	20,44
17	Seleksi PNS Berprestasi dan Pengambilan Sumpah PNS	29.780.000	21.236.450	71,31
18	Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Pegawai	40.000.000	23.370.750	72,74
19	Pelaksanaan Ujian Dinas dan Kenaikan Tingkat PNS	59.996.500	50.811.000	84,69
20	Pengelolaan Kartu Pegawai, Kartu Istri, Kartu Suami dan Kartu Taspen	18.000.000	15.290.000	84,94
21	Penelitian kelengkapan dokumen PNS pindah masuk	43.450.000	1.650.000	3,80
22	Penataan dokumen CPNS	57.830.000	0	0
	Jumlah	3.644.330.300	1.642.312.214	45,06

### 3.2.5. Proses perencanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, bahwa suatu Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut :

1. Menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) untuk lima tahun kedepan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten.
2. Menyusun Rencana Kerja SKPD sebagai penjabaran dari Rencana Strategis dan merupakan perencanaan SKPD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat melalui musyawarah rencana pembangunan kecamatan.
3. Rencana Kerja yang sudah disusun tersebut, selanjutnya dibahas bersama pihak terkait dalam Forum SKPD/Gabungan SKPD yang difasilitasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten.

### **3.2.6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan**

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pasaman menempati Gedung berlokasi di Komplek Kantor Bupati Pasaman Jalan Sudirman Nomor 40 Lubuk Sikaping. Untuk kelancaran tugas operasional didukung oleh 3 unit kendaraan dinas roda empat dan 2 unit kendaraan dinas roda dua serta sarana dan prasarana lainnya.

Untuk pelayanan informasi dibidang kepegawaian sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian mengisyaratkan bahwa perlu adanya Sistem Aplikasi yang berbasis Web. Dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pasaman telah menyediakan perangkat komputer yaitu Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) yang siap diakses dan online dengan Badan Kepegawaian Negara.

Disamping itu untuk memudahkan penyampaian informasi kepegawaian kepada publik, juga disediakan Papan Informasi yang dipajang dibagian luar dinding kantor sehingga masyarakat dapat melihat dengan mudah baik dalam jam kerja maupun diluar jam kerja.

Dalam rangka transparansi dalam pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pasaman bekerjasama dengan Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara, telah menyediakan sistem aplikasi komputer yang disebut Computer Assisted Test (CAT). Dengan adanya CAT ini peserta langsung dapat mengetahui hasil test yang diperolehnya pada hari itu juga apakah lulus atau tidak.

### 3.2.7. Permasalahan dan solusi

#### A. Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- Bidang Diklat
  1. Banyak Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV yang belum mengikuti Diklatpim sesuai dengan Kompetensi yang dimiliki, sementara Peraturan mengamanahkan bahwa setiap Pejabat yang akan dan telah menduduki Jabatan Struktural harus telah mengikuti dan lulus Diklatpim.
  2. Kita tidak memiliki sarana dan Prasarana Diklat termasuk SDM yang berkompeten untuk mengelola Diklat
  3. Belum adanya standar kompetensi yang harus dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara di masing-masing jabatan
  
- Bidang Dokumentasi dan Kesejahteraan
  1. Kegiatan Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah.
    - Rendahnya partisipasi dari PNS dalam peremajaan data yang bersangkutan
    - Terbatasnya pranata komputer pada bidang dokumentasi dan data kepegawaian
    - Terbatasnya sarana dan prasarana
  2. Kegiatan Pengelolaan Kartu Pegawai, Kartu Istri, Kartu Suami dan Kartu Taspen
    - Terbatasnya dana pendukung pada DPA BKD
  
- Bidang Mutasi

Realisasi keuangan pada kegiatan Penelitian Kelengkapan Dokumen Pindah/Masuk sangat rendah, hal ini terjadi karena proses pindah masuk PNS dibahas bersamaan dengan BAPERZAKAT, sehingga dana kegiatan tersebut tidak direalisasikan, namun untuk kegiatan fisik, seluruh permohonan PNS yang pindah/masuk telah diproses sesuai dengan aturan yang ada, atau kegiatan 100%.

#### B. Solusi

- Bidang Diklat
  1. Perlu dilakukan penambahan anggaran untuk Diklatpim sehingga Pejabat yang belum mengikuti Diklatpim dapat diikutkan untuk Diklatkan sesuai dengan kompetensi yang ada
  2. Kedepan kiranya Pemerintah dapat membangun Prasarana dan sarana Diklat, sehingga kita dapat melaksanakan Diklat sendiri tanpa tergantung pada Lembaga Diklat baik Propinsi maupun Kemendagri Regional Bukittinggi
  3. Para pengelola Diklat perlu mengikuti Pelatihan Pengelolaan Diklat, sehingga Diklat yang dilaksanakan memenuhi standar yang dibutuhkan

4. Pemerintah perlu menetapkan standar kompetensi untuk tiap-tiap jabatan Aparatur sehingga kinerja dapat terukur

- Bidang Dokumen dan Kesejahteraan

1. Kegiatan Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah.
  - Memaksimalkan fungsi sarana dan prasarana yang ada
  - Optimalisasi kinerja aparatur yang ada
  - Optimalisasi dana yang ada dan pengajuan tambahan dana
2. Kegiatan Pengelolaan Kartu Pegawai, Kartu Istri, Kartu Suami dan Kartu Taspen
  - Optimalisasi dana pendukung yang tersedia dan pengajuan tambahan dana



**BAB IV**  
**TUGAS PEMBANTUAN**

**4.1. Tugas pembantuan yang diterima**

Tidak ada

**4.2. Tugas pembantuan yang diberikan**

Tidak ada

## **BAB V**

### **TUGAS UMUM PEMERINTAHAN**

#### **5.2. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga**

##### **5.2.1. Mitra yang diajak Kerjasama**

1. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri Regional Bukittinggi.
2. Badan Kepegawaian Negara Regional XII Pekanbaru
3. Yayasan Konseling Keluarga Indonesia (YKK-IND) Padang Sumatera Barat

##### **5.2.2. Dasar Hukum**

1. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 893.3/819a/PUSDIKLAT-2016 dan Nomor 800/919/BKD-2016 Tanggal 25 Agustus 2016.
2. Surat Perjanjian Kerjasama antara Badan Kepegawaian Daerah dengan Badan Kepegawaian Negara Regional XII Pekanbaru tentang Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Nomor 800/566/BKD-2016 tanggal 9 Juni 2016.
3. Surat Perjanjian Kerjasama antara Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pasaman dengan Yayasan Konseling Keluarga Indonesia (YKK-IND) Padang Sumatera Barat tentang Pelaksanaan Nomor 800/926/MTS/BKD/IX-2016 dan Nomor 06/YKK-IND/IX-2016.

##### **5.2.3. Bidang Kerjasama**

1. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tingkat IV.
2. Pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah
3. Pelaksanaan Test Psikologis Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman

##### **5.2.4. Nama Kegiatan**

1. Kegiatan Pendidikan Penjenjangan Struktural
2. Kegiatan Pelaksanaan Ujian Dinas dan Kenaikan Tingkat PNS
3. Kegiatan Penempatan PNS

##### **5.2.5. Nama Kegiatan (SKPD Penyelenggara Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga)**

1. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri Regional Bukittinggi : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pasaman
2. Badan Kepegawaian Negara Regional XII Pekanbaru : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pasaman
3. Yayasan Konseling Keluarga Indonesia (YKK-IND) : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pasaman

##### **5.2.6.**

**Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan sumber daya penyelenggara kerjasama dengan Pihak Ketiga sebagaimana tercantum pada tabel 5.2.1 berikut :**

**Tabel 5.2.1.**

**SDM Penyelenggara Kerjasama dengan Pihak Ketiga kegiatan  
Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pasaman  
(Kegiatan Pendidikan Penjenjangan Struktural)**

No	Jenis Pendidikan	Jumlah	No	Golongan	Jumlah
1	DIPLOMA 1		1	I	
2	SARMUD/D3		2	II	
3	STRATA 1	1	3	III	
4	STRATA 2	2	4	IV	3
	Jumlah	3		Jumlah	3

**Tabel 5.2.1.**

**SDM Penyelenggara Kerjasama dengan Pihak Ketiga kegiatan  
Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pasaman  
(Kegiatan Pelaksanaan Ujian Dinas dan Kenaikan Tingkat PNS)**

No	Jenis Pendidikan	Jumlah	No	Golongan	Jumlah
1	DIPLOMA 1		1	I	
2	SARMUD/D3		2	II	
3	STRATA 1	4	3	III	4
4	STRATA 2		4	IV	
	Jumlah	4		Jumlah	4

**Tabel 5.2.1.**

**SDM Penyelenggara Kerjasama dengan Pihak Ketiga kegiatan  
Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pasaman  
(Kegiatan Penempatan PNS)**

No	Jenis Pendidikan	Jumlah	No	Golongan	Jumlah
1	DIPLOMA 1		1	I	
2	SARMUD/D3		2	II	
3	STRATA 1	3	3	III	2
4	STRATA 2		4	IV	1
	Jumlah	3		Jumlah	3

**5.2.7. Sumber dan Jumlah Anggaran**

1. Dana Kerjasama dengan Pihak Ketiga bersumber dari APBD Kabupaten Pasaman pada DPA Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pasaman dengan jumlah anggaran Rp.708.012.500,-
2. Dana Kerjasama dengan Pihak Ketiga bersumber dari APBD Kabupaten Pasaman pada DPA Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pasaman dengan jumlah anggaran Rp.59.996.500,-
3. Dana Kerjasama dengan Pihak Ketiga bersumber dari APBD Kabupaten Pasaman pada DPA Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pasaman dengan jumlah anggaran Rp.405.923.700,-

**5.2.8. Jangka Waktu Kerjasama**

1. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tingkat IV =  $\pm$  3 bulan
2. Jangka waktu kerjasama 12 bulan
3. Jangka waktu pelaksanaan = 15 hari kalender

**5.2.9. Hasil (output) dari Kerjasama**

1. Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pejabat struktural atau Diklat Pim Tingkat IV sebanyak 16 orang.
2. Terselenggaranya ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah bagi PNS sebanyak 68 PNS.

3. Terlaksananya Test Psikologis Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman

### **5.3. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL**

- 5.3.1. Forum Koordinasi

-

- 5.3.2. Materi Koordinasi

-

- 5.3.3. Instansi Vertikal yang terlibat

-

- 5.3.4. Sumber dan Jumlah Anggaran

-

- 5.3.5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara

-

- 5.3.6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Tabel 5.3.1

SDM Penyelenggara Koordinasi dengan Instansi Vertikal

No	JENIS PENDIDIKAN	JUMLAH	NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	SD		1	I	
2	SLTP		2	II	
3	SLTA		3	III	
4	D1		4	IV	
5	D3				
6	S1				
7	S2				
	Jumlah			Jumlah	

5.3.7. Jumlah Kegiatan Koordinasi yang dilaksanakan

-

5.3.8. Hasil dan manfaat koordinasi

-

5.3.9. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi

-

5.3.10. Hal-hal lain

-

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pasaman dan sekaligus menjadi alat penilaian kinerja SKPD dan alat pendorong untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik.

Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah yang diamantkan kepada Badan Kepegawaian Daerah telah dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya, hal ini dapat dilihat dari realisasi pencapaian target kinerja.

Dari 7 program dan 22 kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah pada tahun 2016, dapat disimpulkan bahwa pencapaian urusan tersebut secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik, meskipun ada kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena terkait dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, untuk tahun yang akan datang perlu dilakukan evaluasi dalam hal penetapan target kinerja sehingga pelaksanaan Program dan Kegiatan dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Lubuk Sikaping, Desember 2016

Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN

Drs. HASIHOLAN HUTAGALUNG

NIP.19660704 199403 1013